



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Bacakan Ketetapan 4 Permohonan yang Diajukan oleh ASN Ditjen Pajak

**Jakarta, 16 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian Materiil Undang-Undang yang diajukan oleh Meidiantoni, S.E., M.M yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak. Sidang ini digelar pada Senin (16/10), pukul 10.00 WIB. Sebelumnya Pemohon mengajukan 4 (empat) perkara pengujian undang-undang yang teregistrasi dengan nomor perkara sebagai berikut: 109/PUU-XXI/2023, 111/PUU-XXI/2023, 112/PUU-XXI/2023, 119/PUU-XXI/2023.

Dalam perkara 109, Pemohon menguji materi KUHP 2023 yang disahkan oleh DPR tanggal 2 Januari 2023, menurut Pemohon KUHP 2023 memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya soal perubahan azas perbarengan tindak pidana dari KUHP kepada KUHP 2023, dan adanya pasal “sampah” dalam KUHP 2023. Sedangkan untuk perkara 111, Pemohon mempersoalkan persentase dan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2023. Kemudian, pada perkara 112, Pemohon menguji perlakuan dana kontribusi dari perusahaan asuransi secara tahunan yang disamakan dengan perlakuan pendapatan bruto dari suatu perusahaan produksi barang secara tahunan. Hal tersebut berimbas pada dikenakannya Pajak pada dana kontribusi pemegang polis. Ketiga perkara tersebut sudah sampai hingga tahap Perbaikan Permohonan. Sedangkan pada perkara 119, MK hanya melakukan sidang konfirmasi penarikan permohonan. Perkara ini menguji tentang pembubaran partai-partai politik atas dugaan pelanggaran pidana oleh DPR RI.

Dari keseluruhan perkara tersebut Pemohon meminta MK untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon serta menjatuhkan vonis perdata berupa sanksi administratif kepada DPR RI (Ketua), Mahkamah Agung (Ketua), Presiden dan Wakil Presiden RI dan menyertorkan sejumlah dana ke rekening Pemohon. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)